



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**UNIT KERJA** : BADAN KEUANGAN DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : PUJIYANTO
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 248865

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **339.050.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 276 m2/96 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 147.570.000
2. Tanah Seluas 130 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 43.550.000
3. Tanah Seluas 158 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 52.930.000
4. Tanah Seluas 246 m2 di KARANGANYAR, WARISAN Rp. 15.000.000
5. Tanah Seluas 884 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
6. Tanah Seluas 1086 m2 di KARANGANYAR, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 15.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **207.250.000**

1. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.250.000
4. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **90.500.000**

**D. SURAT BERHARGA** Rp. **----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	810.112.132
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.446.912.132
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.446.912.132

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.